

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup segala bidang yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak lepas dari peran pemerintah daerahlah yang berwenang untuk mengurus daerahnya masing-masing dalam upaya mempercepat pembangunan tersebut.

Pemberian kewenangan kepada daerah itu sendiri merupakan dampak dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dan bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Sasongko, 2009).

Pembangunan daerah merupakan bagian tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pemberian hak otonomi daerah antara lain bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah agar dapat menggali sumber-sumber keuangan daerah sendiri guna dapat membiayai pelaksanaan pembangunan serta

memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah di daerah otonomi yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Dearah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah. Retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah serta juga memberikan gambaran mengenai kesanggupan suatu daerah dalam membiayai segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan. Sehingga pemerintah harus serius dalam mengoptimalkan penerimaan PAD. Sumber-sumber PAD sangat diharapkan dapat menjadi peran utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Kualitas otonomi yang tinggi dapat dilihat dari banyaknya kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD.

Salah satu komponen PAD yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kota Padang adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber terbesar bagi PAD. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten atau kotamadya yang berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing (Prakosa, 2005). Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat untuk negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali atau balas jasa secara langsung dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada beberapa pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Padang, yaitupajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan,

pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walis, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Terdapat satu jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang di kelola oleh Pemerintah Kota Padang yaitu pajak reklame. Menurut Siahaan (2005) pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame. Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Terlihat bahwa objek pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki objek pajak yang cukup banyak, walaupun objek pajak reklame jumlahnya banyak tetapi pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak reklame cenderung meningkat, namun kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah berfluktuatif.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Reklame Kota Padang
Tahun 2011-2016

Tahun	Pajak Reklame (Juta)
2012	3.578.627.000
2013	3.705.954.000
2014	3.389.971.900
2015	5.618.654.300
2016	7.743.923.716

Sumber : BPS Kota Padang

Dari table diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak reklame pada waktu lima tahun belakangan ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan penerimaan pajak reklame dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2014 penerimaan pajak reklame kembali mengalami penurunan. Meskipun pada tahun 2014 penerimaan pajak reklame sedikit mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2015 dan tahun 2016 kembali mengalami

peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya sebesar 5.618.654.300 pada tahun 2015 dan 7.743.923.716 pada tahun 2016.

Realisasi pajak reklame setiap tahunnya masih cukup kecil di bandingkan dengan jenis pajak lainnya. Hal ini membuktikan bahwa pajak reklame bukan merupakan pajak unggulan di Kota Padang, melihat kenyataan di lapangan reklame banyak ditemukan ditempat-tempat umum namun kontribusinya masih relatif kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial bagi Kota Padang pada waktu yang akan datang. Pajak daerah dapat dikatakan tinggi apabila disuatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dan penerimaan pajak daerah dikatakan rendah apabila disuatu daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah pula. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB. PDRB sering digunakan untuk melihat tolak ukur kesejahteraan dan tingkat pembangunan suatu negara atau daerah. Maka dari itu semakin tinggi PDRB disuatu daerah maka menunjukkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan yang tinggi pula, sehingga akan mendorong peningkatan reklame di daerah tersebut dan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame.

Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti sekarang ini, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara karena terasa sangat penting dalam perencanaan maupun pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Pertumbuhan ini akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perusahaan/perusahaan dan kesejahteraan rakyat. Hal inilah yang dijadikan pertimbangan bagi penulis untuk meneliti pajak reklame di Kota Padang. Kenyataan yang ada di lapangan bahwa reklame banyak ditemukan di tempat-tempat umum seperti di pohon-pohon, pusat keramaian, taman-taman dan di sepanjang jalan.

Penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pertama kali dilakukan di Indonesia sebagai acuan serta perbandingan bagi penulis. Prasedyawati (2013) menggambarkan hubungan antara indikator jumlah penduduk, jumlah perusahaan dan PDRB terhadap penerimaan pajak reklame. Istianto (2011) menggambarkan hubungan antara indikator jumlah penduduk, jumlah perusahaan dan PDRB terhadap penerimaan pajak reklame.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah perusahaan dan PDRB perkapital terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Padang dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Kota Padang”**.

1.1 Perumusan Masalah

Dalam melakukan pembiayaan atas pembangunan banyak sumber pendapatan yang dapat dikembangkan, salah satunya pajak daerah khususnya pajak reklame. Besarnya penerimaan pajak reklame pada dasarnya tergantung pada kesiapan daerah dan potensi daerah tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang adalah adanya potensi pajak reklame yang belum digunakan secara maksimal. Hal ini terbukti dari sedikitnya kontribusi pajak reklame terhadap PAD, padahal terdapat peluang yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu dari pajak daerah yang berpotensi untuk dapat dikembangkan. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti hanya dibatasi mengenai jumlah penduduk, jumlah perusahaan dan PDRB periode 1993-2016 di Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak reklame Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh jumlah perusahaan terhadap penerimaan pajak reklame Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak reklame Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, jumlah perusahaan dan PDRB perkapital secara simultan terhadap penerimaan pajak reklame Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini diarahkan pada beberapa tujuan berikut ini:

1. Mengalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak reklame Kota Padang.
2. Menganalisis pengaruh jumlah perusahaan terhadap penerimaan pajak reklame Kota Padang.
3. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak reklame Kota Padang.
4. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk, jumlah perusahaan dan PDRB perkapital secara simultan terhadap penerimaan pajak reklame Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat bukti empiris dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame Kota Padang.

2. Kontribusi kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi pajak reklame Kota Padang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Topik utama penelitian ini adalah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Padang. Variabel independen dalam penelitian ini jumlah penduduk, jumlah perusahaan dan PDRB. Penelitian ini menggunakan data runtut waktu (*time series*) pada periode tahun 1993 sampai tahun 2016. Metode yang digunakan adalah model regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least square*).

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penelitian ini. Tulisan ini terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Literatur

Dalam bab ini membahas landasan teori yang menjadi dasar bagi pembahasan penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka analisis dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, data dan sumber data. definisi operasional variabel, metoda analisis data dan model empiris.

Bab IV Gambaran Umum Penelitian

Bab ini menjelaskan sub bab yang meliputi deskriptif obyek penelitian dan deskripsi variabel.

Bab V Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan analisa proses data. Hasil penelitian dengan menggunakan model regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*).

Bab VI Kesimpulan

Bab ini berisikan uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

